JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA DI DESA SUNGAI TURAK KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Hidayat[1], Arpandi[2], Mahdalina[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: hidayatstc01@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak telah dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah setiap hari Kamis oleh petugas yang ditunjuk. Akan tetapi, pelaksanaannya masih kurang optimal karena masih terdapat beberapa kendala. Sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal sehingga pemahaman mengenai tujuan, tata cara, dan peran dalam pengelolaan sampah masih kurang. Selain itu, keterbatasan tempat sampah yang belum memadai, serta belum tersedia *Standar Operasional Prosedur* (SOP) secara tertulis sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 13 orang informan yang dipilih secara *purposive*, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menggunakan uji kredibilitas yang meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator transmisi berjalan cukup optimal, karena informasi belum diterima merata. Konsistensi kurang optimal, karena penyampaian informasi belum rutin. Staf berjalan cukup optimal, karena masih terkendala keterlambatan pengangkutan. Informasi kurang optimal, karena belum ada sosialisasi langsung kepada masyarakat. Wewenang berjalan sudah optimal, karena kewenangan sudah cukup jelas. Fasilitas kurang optimal, karena keterbatasan tempat sampah. Efek disposisi kurang optimal, karena kurang maksimalnya keterlibatan aparat kepada masyarakat. Insentif belum optimal karena belum ada penghargaan maupun sanksi. Membuat SOP kurang optimal karena belum tersedia SOP tertulis. Fragmentasi berjalan cukup optimal, karena adanya kerja sama. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 dipengaruhi oleh faktor pendukung yang meliputi penyampaian informasi melalui Ketua RT serta ketersediaan petugas pengangkut sampah, sedangkan faktor penghambat meliputi belum adanya sosialisasi, keterbatasan pada sarana dan prasarana, serta belum adanya kebijakan mengenai sanksi, penghargaan, dan SOP tertulis. Saran kepada Pemerintah Desa Sungai Turak untuk meningkatkan sosialisasi, menyusun SOP pengelolaan sampah, memperkuat pengawasan, serta menerapkan penghargaan dan sanksi. Selain itu, petugas pengangkut sampah diharapkan meningkatkan waktu pengangkutan, dan masyarakat perlu meningkatkan partisipasi serta menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

Waste management in Sungai Turak Village has been implemented through waste collection and transportation every Thursday by designated officers. However, implementation remains suboptimal due to several obstacles. Public outreach has not been optimal, resulting in a lack of understanding of the objectives, procedures, and roles in waste management. Furthermore, there are limited and inadequate trash bins, and there is no written Standard Operating Procedure (SOP) as a guideline for waste management implementation. This study used a qualitative, descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with 13 purposively selected informants. Data were then analyzed through data reduction, data

presentation, conclusion drawing, and verification using credibility testing, which included extended observation, increased diligence, triangulation, negative case analysis, use of reference materials, and member checking. The results indicate that the implementation of Regent Regulation Number 74 of 2018 concerning Policies and Strategies for Household Waste Management and Household-Like Waste in Sungai Turak Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency, has been quite optimal. This can be seen from the transmission indicators, which are quite optimal, because information has not been received evenly. Consistency is less than optimal, because information delivery is not routine. Staffing is quite optimal, because it is still hampered by delays in transportation. Information is less than optimal, because there has not been direct socialization to the community. Authority is running optimally, because authority is quite clear. Facilities are less than optimal, due to limited trash bins. The disposition effect is less than optimal, due to the lack of maximum involvement of officers with the community. Incentives are less than optimal because there are no rewards or sanctions. Creating SOPs is less than optimal because there is no written SOP available. Fragmentation is running quite optimal, due to cooperation. The implementation of Regent Regulation Number 74 of 2018 is influenced by supporting factors such as information dissemination via neighborhood association (RT) heads and the availability of waste collection personnel and hindered by factors including a lack of public outreach, limited facilities and infrastructure, and the absence of policies regarding sanctions, incentives, and written Standard Operating Procedures (SOPs). Recommendations for the Sungai Turak Village Government include enhancing public outreach, formulating waste management SOPs, strengthening oversight, and implementing a system of incentives and sanctions. Additionally, waste collection personnel are expected to improve collection schedules, while the community needs to increase participation and maintain environmental cleanliness by refraining from indiscriminate littering.

Keywords**:** *Implementation, Policy, Waste Management*

PENDAHULUAN

Sampah adalah salah satu prmasalahan lingkungan yang masih merupakan tantangan di berbagai daerah Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah diiringi dengan meningkatnya berbagai aktivitas masyarakat mengakibatkan jumlah sampah terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, sampah merupakan sisa atau bahan buangan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Sampah adalah limbah yang berasal dari proses produksi, baik yang dilakukan oleh para sektor industri maupun kegiatan domestik atau rumah tangga (Chusnul Chotimah, 2020:11–12).

Selain rumah tangga, sampah itu juga biasanya berasal dari berbagai aktivitas lain, seperti perkantoran, rumah makan, hotel, penginapan, industri, proyek pembangunan, serta sektor transportasi. Apabila sampah tidak dikelola, maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan pencemaran dan bau yang tidak sedap, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara rutin, terencana, dan berkelanjutan agar kualitas lingkungannya tetap terjaga. Sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatur pengelolaan sampah, dari upaya pengurangan, pemilahannya, pengumpulan, pengangkutan oleh petugas, hingga pengolahan sampahnya.

Permasalahan sampah juga menjadi tantangan yang dihadapi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hingga saat ini, pengelolaan sampah, khususnya sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, juga masih belum terlaksana secara optimal sejak dari sumbernya. Padahal, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah setiap

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

hari terus bertambah. Kondisi tersebut terlihat dari banyaknya sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Tebing Liring, Kecamatan Amuntai Utara, yang berkisar sekitar 95 ton per harinya. Banyaknya sampah tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah. Landasan hukum dari pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur upaya pengurangan sampah dengan penerapan dari prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), serta penanganan terhadap residu yang dihasilkan dari penerapan prinsip tersebut (Dwi Indrawati, 2021:5–7).

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan tersebut memuat kebijakan serta rencana yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penanganan sampah dari rumah tangga dan sejenisnya. Cara pengurangan dilakukan menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) guna menekan jumlah hasil sampah, sedangkan penanganan sampah dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari pemilahan hingga pengolahan akhir. Meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada tingkat desa, sehingga tujuan pengelolaan sampah belum sepenuhnya tercapai.

Pada Desa Sungai Turak, pengelolaan sampah sudah mulai dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas yang telah ditunjuk. Masyarakat juga telah mengetahui jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan setiap hari Kamis. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah masih belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala yang dihadapi baik dari sisi pemerintah desa, petugas, maupun masyarakat.

Hasil pengamatan awal peneliti pada saat observasi menunjukkan adanya beberapa permasalahan pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak, yaitu:

1. 1. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak masih kurang maksimal. Selain penyampaian informasi kepada masyarakat belum dilakukan secara konsisten karena umumnya hanya dilakukan secara terbatas, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. *(Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan informasi dari Kantor Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, 2026)*
2. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti tempat sampah, sehingga menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah dan menyebabkan penumpukan sampah di beberapa titik yang berpotensi menimbulkan bau tidak sedap serta mencemari lingkungan, meskipun jumlah tenaga pelaksana telah mencukupi. *(Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan dilapangan, 2026)*
3. Keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan karena pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak kurang maksimal. Selain itu, koordinasi antar pelaksana masih belum berjalan secara maksimal meskipun kerja sama telah terjalin dengan baik. Selain itu, belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi dalam pengelolaan sampah. *(Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan dilapangan, 2026)*
4. Belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertulis sebagai pedoman

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak, sehingga pelaksanaannnya hanya mengacu pada jadwal pengangkutan yang telah diketahui masyarakat. *(Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan informasi dari kantor desa serta kondisi nyata yang ditemukan dilapangan, 2026)*

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Satria Mandala (2022) berjudul "*Implementasi Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)*". Penelitian tersebut merupakan karya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara dari Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dari hasil penelitiannya, dikatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup pada pengelolaan sampah telah berjalan cukup baik melalui berbagai cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah. Namun, pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung, serta sosialisasi kepada masyarakat yang belum optimal. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, pengelolaan sampah yang dilaksanakan pemerintah dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus kajiannya. Penelitian Agung Satria Mandala menitikberatkan pada implementasi peraturan daerah berdasarkan perspektif hukum Islam (*siyasah dusturiyah*), sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik serta efektivitas pelaksanaannya di lokasi penelitian yang berbeda. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji pengelolaan sampah dan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Muhammad Syarif (2022) dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul)*". Penelitian tersebut merupakan karya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannyamenggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa implementasi dari kebijakan pengelolaan sampah masih belum berjlan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh belum adanya ketentuan mengenai batas maksimal pembuangan sampah dari setiap rumah tangga, terbatasnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta jadwal pengangkutan sampah yang belum ditetapkan secara jelas. Selain itu, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah melampaui daya tampung turut menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Perbedaan dari penelitian Muhammad Syarif dengan penelitian ini ada pada sudut pandang analisis yang digunakan. Penelitian Muhammad Syarif mengkaji implementasi kebijakan dari perspektif hukum lingkungan, sedangkan penelitian ini meninjaunya dari perspektif administrasi publik. Adapun persamaannya adalah membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta fokus pada efektivitas pelaksanaan kebijakan serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah.

Anderson dalam (Budi Winarno, 2014:19), istilah dari kebijakan digunakan untuk menggambarkan perilaku aktor, baik pejabat, kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Sahya Anggara (2014:36) tujuan kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik ditetapkan oleh lembaga yang legitimasi dalam sistem pemerintahan.

Dalam proses kebijakan publik, implementasi sering dipandang dengan tahap pelaksanaan terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh para pengambil kebijakan sehingga keberadaannya terkadang dianggap kurang menentukan. Padahal, implementasi adalah tahapan yang penting karena keberhasilan suatu kebijakan itu tidak bergantung pada perumusannya saja, namun juga sejauh mana kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan efektif dan sesuai pada tujuan yang diterapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada proses analisis secara induktif untuk memahami hubungan yang bersifat dinamis antarfenomena yang diteliti. Seluruh proses analisis dilakukan dengan tetap berlandaskan pada kaidah-kaidah ilmiah. (Gunawan, 2015:80). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive* (bertujuan), sehingga diperoleh sebanyak 13 orang informan yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas yang mencakup perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketelitian peneliti, triangulasi, analisis terhadap kasus negatif, pemanfaatan bahan referensi, serta pelaksanaan *membercheck*.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Komunikasi

1) Transmisi

George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022:154–159) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi pada kebijakan. Suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila informasi mengenai tujuan, tugas, dan tanggung jawab dapat disampaikan kepada para pelaksana secara tepat sehingga mudah dipahami dan diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, transmisi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak berjalan cukup optimal. Informasi mengenai pengelolaan sampah telah disampaikan kepada masyarakat, namun penyampaiannya masih dilakukan melalui Ketua RT sehingga belum seluruh warga memperoleh informasi secara langsung dan merata. Hal tersebut sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022:154–159) yang menegaskan bahwa penyampaian informasi harus dilakukan secara jelas, tepat, dan menyeluruh agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara optimal.

2) Konsistensi

Konsistensi menunjukkan bahwa setiap arahan atau kebijakan yang diberikan harus tetap dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaannya. Konsistensi diperlukan agar

pelaksana memiliki pedoman yang jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan ketika menjalankan kebijakan.

Dari hasil wawancara dan observasi, konsistensi pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak berjalan kurang optimal. Informasi mengenai pengelolaan sampah belum disampaikan secara rutin dan berkesinambungan karena penyampaiannya hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau ketika muncul permasalahan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022:154–159), yang menyatakan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan harus berlangsung secara konsisten agar pelaksana maupun masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan kebijakan.

b. Sumber Daya

1) Staf

Staf adalah sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan staf yang memadai, serta kompetensi yang dimiliki. Sebaliknya, keterbatasan jumlah staf atau rendahnya kemampuan yang dimiliki dapat menjadi penyebab tidak optimalnya implementasi kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa staf dalam pelaksanaannya berjalan cukup optimal. Jumlah petugas pengangkut sampah sudah mencukupi dan petugas juga memahami tugas serta teknis pengelolaan sampah. Selain itu, pengangkutan sampah telah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengangkutan, kerusakan kendaraan, kondisi cuaca, serta sampah yang cukup banyak sehingga pada waktu tertentu terjadi penumpukan sampah. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159) yang menyatakan bahwa keberadaan staf dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, staf atau petugas pengangkut sampah sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, memahami pekerjaan yang harus dilakukan, serta melaksanakan pengangkutan sampah secara rutin sesuai jadwal yang ada. Meskipun masih dihadapkan beberapa kendala seperti keterlambatan pengangkutan, kerusakan, kondisi cuaca, dan jumlah sampah yang cukup banyak sehingga menyebabkan penumpukan sampah pada waktu tertentu, maka staf sudah mendukung terlaksananya kebijakan dengan cukup baik.

2) Informasi

Informasi mempunyai kaitan dengan tata cara pelaksanaan kebijakan serta mengenai kepatuhan para pelaksana pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Kedua bentuk informasi tersebut berperan penting sebagai pedoman dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa indikator informasi berjalan kurang optimal. Penyampaian informasi hanya dilakukan melalui rapat aparat desa dan Ketua RT tanpa adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat di Desa Sungai Turak. Selain itu, kurangnya media informasi membuat masyarakat masih kurang memahami cara pemilahan dan juga pengelolaan sampah yang benar yang berarti tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159) yang menyatakan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas, tepat sasaran,

dan sampai ke semua masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah masih terbatas melalui rapat aparat desa dan Ketua RT, serta belum ada sosialisasi langsung maupun media informasi yang memadai. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dan pemilahan sampah masih belum merata sehingga pelaksanaan pada indikator informasi belum sepenuhnya sesuai dengan teori tersebut.

3) Wewenang

Wewenang pada dasarnya harus bersifat memiliki dasar yang bersifat formal agar setiap perintah dapat dilaksanakan secara tepat. Wewenang tersebut berfungsi sebagai bentuk legitimasi yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi bahwa indikator wewenang pada pelaksanaan sudah berjalan optimal. Pembagian tugas antara aparat desa, Ketua RT, dan petugas pengangkut sampah sudah jelas dan sudah dijalankan masing-masing. Hasil tersebut sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159) yang menyatakan bahwa kejelasan wewenang dan tanggung jawab pelaksana pengelolaan sampah penting dan mendukung keberhasilan implementasi untuk kebijakan. Dalam pelaksanaannya, pembagian wewenang antara aparat desa, Ketua RT, dan petugas pengangkut sampah sudah jelas menjalankan tugas sesuai perannya. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengangkutan dan kurangnya pengawasan langsung di lapangan, maka pelaksanaan wewenang sudah mendukung jalannya kebijakan dengan cukup baik.

4) Fasilitas

Dalam implementasi kebijakan, fasilitas memiliki peranan yang sangat penting. Ketersediaan staf yang memadai, pemahaman terhadap tugas, serta kejelasan wewenang belum cukup untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan apabila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, disimpulkan indikator fasilitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan berjalan kurang optimal. Mobil pengangkut sampah sudah cukup memadai. Namun, ketersediaan tempat sampah masih terbatas dan lokasinya belum mudah dijangkau oleh masyarakat karena letaknya cukup jauh dari permukiman. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat menumpuk atau membuang sampah di sekitar rumah maupun di tepi jalan sehingga sampah sering berserakan dan menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159) yang menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Walaupun kendaraan pengangkut sampah telah tersedia dan dapat digunakan dalam kegiatan operasional, keterbatasan jumlah tempat sampah serta lokasinya yang jauh masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam membuang sampah pada tempat yang tersedia apa adanya sehingga dukungan fasilitas terhadap implementasi kebijakan belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, fasilitas yang ada belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara baik sesuai dengan teori tersebut.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

c. Disposisi

1) Efek Disposisi

Efek disposisi menggambarkan sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana yang memunculkan berbagai faktor penghambat pada proses implementasi apabbila pelaksana tidak memiliki kesungguhan atau tidak melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan, maka dapat menjadi hambatan dalam proses implementasi.

Melalui wawancara dan observasi, indikator efek disposisi dalam pelaksanaannya berjalan kurang optimal. Aparat desa, Ketua RT, dan petugas pengangkut sampah sudah menunjukkan kepedulian melalui himbauan, teguran, dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena pengawasan belum dilakukan secara rutin sehingga masih ada masyarakat membuang sampah sembarangan yang berarti tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159) yang menyatakan bahwa efek disposisi berpengaruh terhadap keberhasilan dan mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan. Meskipun aparat desa, Ketua RT, dan petugas pengangkut sampah telah menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya melalui pemberian imbauan, teguran, dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, pelaksanaan pengawasan yang belum dilakukan menyebabkan masih terdapat masyarakat yang belum mematuhi ketentuan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, indikator efek disposisi masih memerlukan peningkatan agar implementasi kebijakan dapat terlaksana lebih optimal.

2) Insentif

Insentif merupakan faktor yang memengaruhi perilaku pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Pada umumnya, setiap individu memiliki kepentingan tertentu sehingga pemberian insentif oleh pembuat kebijakan, baik dalam bentuk penghargaan maupun sanksi, dapat mendorong pelaksana untuk melaksanakan tugasnya secara lebih optimal.

Dari observasi serta wawancara menyatakan bahwa indikator insentif dalam pelaksanaannya berjalan belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari belum adanya penerapan penghargaan maupun sanksi secara khusus kepada pelaksana maupun masyarakat. Bentuk penghargaan yang diberikan masih terbatas pada honor atau gaji serta penyediaan perlengkapan kerja. Akibatnya, pemberian insentif belum mampu memberikan dorongan yang optimal dalam meningkatkan motivasi, kedisiplinan, dan kinerja para pelaksana. Kondisi tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159) yang menyatakan bahwa insentif berupa sanksi dan penghargaan diperlukan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, belum adanya penerapan sanksi maupun penghargaan, sehingga indikator insentif belum berjalan sesuai dengan teori tersebut.

d. Struktur Birokrasi

1) Membuat SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan rangkaian prosedur atau tata cara kerja yang disusun secara sistematis sebagai pedoman bagi pegawai maupun pelaksana kebijakan, seperti aparatur, administratur, dan birokrat, dalam melaksanakan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

tugas serta aktivitas sehari-hari (*day-to-day activities*) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Hasil observasi dan wawancara peneiti menyimpulkan SOP pada pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan kurang optimal karena sudah ada jadwal pengangkutan yang rutin setiap minggu. Tetapi, pelaksanaannya belum maksimal karena belum adanya SOP atau aturan tertulis yang jelas, serta masih terjadi keterlambatan pengangkutan yang menyebabkan penumpukan sampah di lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan SOP yang lebih jelas agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih teratur. Hal tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159) bahwa konsep *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang seharusnya memberikan aturan yang jelas, tertulis, dan terarah dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, memang sudah ada jadwal pengangkutan setiap minggu, namun belum ada SOP tertulis yang jelas. Selain itu, masih sering terjadi keterlambatan pengangkutan dan tidak adanya petunjuk atau aturan yang mudah dipahami masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator membuat SOP berjalan kurang optimal dalam mendukung keteraturan pelaksanaan pengelolaan sampah.

2) Melaksanakan Fragmentasi

Fragmentasi bertujuan membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap pihak yang terlibat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pembagian tersebut agar setiap unsur dapat bekerja secara terkoordinasi sehingga tujuan kebijakan lebih mudah dicapai.

Hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi memperlihatkan pelaksanaan fragmentasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak berjalan cukup optimal karena sudah ada kerja sama dan pembagian tugas antara aparat desa, Ketua RT, petugas pengangkut sampah, dan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih terdapat kendala seperti keterlambatan pengangkutan, kurangnya penyampaian informasi, serta masih adanya masyarakat yang belum patuh terhadap aturan pengelolaan sampah. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengelolaan sampah belum berjalan sepenuhnya optimal. Pada dasarnya konisi tersebut sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159) yang menyatakan bahwa fragmentasi atau pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas dan didukung kerja sama antar pelaksana. Dalam pelaksanaannya, sudah terdapat pembagian tugas antara aparat desa, Ketua RT, petugas pengangkut sampah, dan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi, keterlambatan pengangkutan, serta ketidakpatuhan sebagian masyarakat, sehingga pelaksanaan fragmentasi belum berjalan secara maksimal sesuai dengan teori tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Sungai Turak, pemerintah desa telah berupaya melaksanakan pengelolaan sampah melalui penyampaian informasi kepada masyarakat, penyediaan petugas pengangkut sampah, serta penjadwalan pengangkutan sampah secara rutin. Akan teteapi, pelaksanaannya masih

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung serta faktor penghambat yang meliputi:

a. Faktor Pendukung

1) Transparansi dari Ketua RT

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi pengelolaan sampah melalui Ketua RT menjadi faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 di Desa Sungai Turak. Peran Ketua RT sebagai perantara informasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aspek komunikasi berjalan cukup optimal karena informasi dari pemerintah desa tetap dapat diteruskan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti belum dilaksanakannya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat serta masih rendahnya kepedulian sebagian warga terhadap imbauan yang diberikan. Namun, secara keseluruhan peran Ketua RT memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak.

2) Kecukupan Jumlah Petugas Pengangkut Sampah

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kecukupan jumlah petugas pengangkut sampah menjadi faktor yang mendukung dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 di Desa Sungai Turak. Tersedianya enam orang petugas yang memahami teknis pengelolaan sampah menunjukkan bahwa dukungan sumber daya manusia berjalan optimal. Kondisi tersebut memungkinkan kegiatan pengangkutan sampah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan pengangkutan, kerusakan kendaraan, kondisi cuaca, dan sampah yang cukup besar pada waktu tertentu. Keberadaan petugas memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan agar dapat berjalan lebih optimal.

b. Faktor Penghambat

1) Belum Adanya Sosialisasi Pengelolaan Sampah Secara Khusus

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa belum adanya sosialisasi pengelolaan sampah secara khusus menjadi kendala yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan di Desa Sungai Turak. Penyampaian informasi yang belum dilakukan secara langsung kepada masyarakat menjadi penyebab aspek komunikasi berjalan kurang optimal. Pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih belum merata sehingga masih ditemukan masyarakat membuang sampah masih sembarangan, ada juga yang membuang ke sungai, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah yang optimal.

2) Terbatasnya Anggaran Menyebabkan Sarana dan Prasarana tidak Memadai

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterbatasan dana untuk penambahan sarana dan prasarana menjadi faktor yang menghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 di Desa Sungai Turak. Keterbatasan anggaran menyebabkan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, khususnya tempat sampah yang mudah dijangkau masyarakat, belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aspek dukungan sumber daya berjalan kurang optimal, sehingga masih ditemukan

berbagai permasalahan seperti penumpukan sampah, keterbatasan tempat pembuangan sementara, dan kurang optimalnya pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

3) Lemahnya Implementasi Regulasi Dilapangan

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan untuk mengatur sanksi dan penghargaan pengelolaan sampah rumah tangga menjadi penghambat dalam implementasi. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi dan penghargaan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aspek disposisi berjalan kurang optimal. Kondisi ini menyebabkan kurangnya motivasi dan dorongan bagi petugas maupun masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan, dan partisipasi dalam pengelolaan sampah sehingga tujuan kebijakan pengelolaan sampah belum dapat tercapai secara maksimal.

4) Belum Adanya SOP Tertulis mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa belum adanya SOP tertulis mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang menyebabkan pedoman kerja dalam pengelolaan sampah belum tersusun secara jelas. Akibatnya, pelaksanaan tugas belum memiliki standar yang nyata sehingga konsistensi dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan agar berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan terkait Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan tersebut secara umum sudah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan agar terlaksana secara optimal. Hal ini didasarkan pada hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menunjukkan bahwa sebagian indikator telah berjalan cukup optimal, namun sebagian indikator lainnya masih menghadapi berbagai kendala sehingga pelaksanaan kebijakan belum mencapai hasil yang maksimal. Dilihat dari indikator *Pertama*, transmisi berjalan cukup optimal karena penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah telah dilakukan melalui Ketua RT sebagai perantara antara pemerintah desa dan masyarakat. Akan tetapi, penyampaian informasi masih dilakukan secara tidak langsung dan belum didukung oleh kegiatan sosialisasi khusus sehingga informasi yang diterima masyarakat belum sepenuhnya merata. *Kedua*, konsistensi berjalan kurang optimal karena penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, melainkan hanya pada waktu tertentu atau ketika muncul permasalahan. *Ketiga*, staf berjalan cukup optimal karena jumlah petugas pengangkut sampah telah mencukupi dan memahami tugas serta teknis pengelolaan sampah. Selain itu, pengangkutan sampah telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah desa, meskipun masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengangkutan, kerusakan kendaraan, kondisi cuaca, dan volume sampah yang cukup banyak sehingga menyebabkan penumpukan sampah pada waktu tertentu. *Keempat*, Informasi berjalan kurang optimal karena penyampaian informasi hanya dilakukan melalui rapat aparat desa dan Ketua RT tanpa adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan media informasi menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah masih kurang. *Kelima*, wewenang berjalan sudah optimal karena pembagian tugas antara aparat desa, Ketua RT, dan petugas pengangkut sampah telah jelas dan dilaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing. *Keenam*, fasilitas berjalan kurang optimal karena meskipun mobil pengangkut sampah

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

sudah cukup memadai, jumlah tempat sampah masih terbatas dan lokasinya jauh dari rumah masyarakat sehingga sampah sering menumpuk dan berserakan di lingkungan. *Ketujuh*, efek disposisi berjalan kurang optimal karena aparat desa, Ketua RT, dan petugas pengangkut sampah telah menunjukkan kepedulian melalui himbauan, teguran, dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaannya belum maksimal karena kegiatan gotong royong belum dilakukan secara rutin sehingga masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan. *Kedelapan*, insentif berjalan belum optimal karena belum adanya sanksi maupun penghargaan yang diberikan secara khusus kepada masyarakat maupun petugas pengelola sampah. Penghargaan yang diberikan masih sebatas honor atau gaji dan perlengkapan kerja sehingga belum mampu meningkatkan motivasi, kedisiplinan, dan kinerja pelaksana secara maksimal. *Kesembilan*, membuat SOP berjalan kurang optimal karena *Standar Operasional Prosedur* (SOP) secara tertulis yang dapat mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga belum tersedia. Pelaksanaan kegiatan masih berpedoman pada jadwal pengangkutan yang telah ditetapkan sehingga keterlambatan pengangkutan masih terjadi dan mengakibatkan penumpukan sampah. *Kesepuluh*, melaksanakan fragmentasi berjalan cukup optimal karena telah terdapat pembagian tugas dan kerja sama antara aparat desa, Ketua RT, petugas pengangkut sampah, dan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterlambatan pengangkutan, penyampaian informasi yang belum maksimal, serta masih rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan sampah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 2 faktor yaitu faktor pendukung implementasi yang meliputi transparansi dari Ketua RT serta kecukupan jumlah petugas pengangkut sampah dan faktor penghambat implementasi yang meliputi belum adanya sosialisasi pengelolaan sampah secara khusus, terbatasnya anggaran menyebabkan sarana dan prasarana tidak memadai, lemahnya implementasi regulasi dilapangan, serta belum adanya SOP tertulis mengenai sampah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim (2018). *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.* Amuntai: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Anonim. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi.* Amuntai: Program Studi Administrasi Publik.

Adawiyah, M. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Karias dan Tambalangan)*. Kebijakan Publik.

Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Chotimah, C. (2020). *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.* (D. M. Fauzi, Penyunt.) Tulungagung: Akademia Pustaka.

Gunawan, Imam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Bumi Aksara.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Indrawati, D. (2021). *Pengelolaan Sampah, Teori dan Prinsip Perencanaan.* (T. Senyum, Penyunt.) Surabaya: CV. Pustaka MediaGuru.

Mandala, A. S. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)*.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan.* Bandung: Alfabeta.

Syarif, M. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul).* Yogyakarta: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.